

Problematika Pelembagaan Partai Buruh Sebagai Partai Baru di Sulawesi Selatan

Andi Rahmat Hidayat ^{1*}; Muhammad ²; Sakinah Nadir ³

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; andirahmathidayat90@gmail.com

*Correspondence : andirahmathidayat90@gmail.com

ABSTRAK

Partai Buruh Sulawesi Selatan merupakan partai politik baru di Sulawesi Selatan yang lahir pada tahun 2021. Meski demikian, partai ini menghadapi sejumlah problematika dalam proses pelembagaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pelembagaan Partai Buruh Sulawesi Selatan sebagai partai politik baru di Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pelembagaan Partai Buruh Sulawesi Selatan terutama terkait dengan masalah keuangan, manajemen internal partai, dan dukungan politik. Kendala-kendala ini menyebabkan Partai Buruh Sulawesi Selatan mengalami kesulitan dalam membangun struktur organisasi yang solid dan kredibel, serta menjalankan kampanye politik. Studi ini memberikan saran untuk meningkatkan pelembagaan Partai Buruh Sulawesi Selatan dengan memperbaiki manajemen keuangan dan organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, dan memperluas jaringan dukungan politik..

ABSTRACT

The South Sulawesi Labor Party is a new political party in South Sulawesi that was born in 2021. However, this party faces a number of problems in its institutionalization process. This research aims to analyze the problematic institutionalization of the South Sulawesi Labor Party as a new political party in South Sulawesi. The method used is qualitative with data collection techniques through interviews and field observations. The results showed that the problems of institutionalizing the South Sulawesi Labor Party were mainly related to financial issues, internal party management, and political support. These constraints have caused the South Sulawesi Labor Party to experience difficulties in building a solid and credible organizational structure, as well as running political campaigns. This study provides suggestions for improving the institutionalization of the South Sulawesi Labor Party by improving financial and organizational management, improving the quality of regeneration, and expanding political support networks.

Kata kunci

Partai buruh, pelembagaan, partai politik, partai baru, sulawesi selatan

Keywords

Labor Party, institutionalization, political party, new party, South Sulawesi.

Pendahuluan

Partai politik merupakan salah satu lembaga politik yang berperan penting dalam demokrasi sebuah negara. Partai politik bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana untuk mengambil keputusan politik dalam sebuah negara demokratis. Dalam teori partai politik, terdapat beberapa konsep penting seperti ideologi, program partai, basis massa, dan organisasi partai. Partai politik adalah “setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas”. (Lapalombara & Anderson, 1992)

Menurut pendapat Friedrich, partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil”. Kemudian Neumann berpendapat bahwa definisi “partai politik sebagai organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”. (Budiardjo, 2008)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik dijelaskan “sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 (2008).

Di Indonesia, partai politik telah banyak bermunculan sejak era reformasi pada tahun 1998, termasuk di Sulawesi Selatan. Salah satu partai politik yang baru muncul di Sulawesi Selatan adalah Partai Buruh. Partai Buruh di Sulawesi Selatan dibentuk pada tahun 2014 dengan fokus pada isu-isu buruh dan tenaga kerja. Partai Buruh memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah masyarakat, terutama di kalangan buruh dan tenaga kerja. Namun, dalam pelembagaannya sebagai partai politik, Partai Buruh mengalami berbagai problematika, terutama dalam hal pelembagaan.

Pelembagaan partai politik merupakan proses formalisasi partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang sah secara hukum. Pelembagaan meliputi berbagai aspek, mulai dari pendirian partai hingga pembentukan struktur organisasi dan pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelebagaan partai politik membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota partai untuk memperkuat organisasi partai. Pentingnya pelebagaan partai politik sebagai lembaga yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, hal ini berfungsi untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, serta upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelebagaan partai politik yang lebih konsisten dan berkelanjutan.(Yuda Wiryono, 2021) Meskipun ada upaya untuk menciptakan sistem partai politik yang lebih kuat di Indonesia, tetapi sistem politik Indonesia masih didominasi oleh oligarki partai politik yang mempertahankan kontrol mereka atas sumber daya politik dan ekonomi. Ada potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dan representasi yang lebih baik melalui pengembangan partai politik yang lebih kuat dan perluasan ruang politik.(Kahin & Aspinall, 2021)

Proses pelebagaan terjadi ketika sebuah kebijakan atau program pemerintah berhasil diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga menjadi bagian dari institusi yang mapan dan diakui oleh masyarakat. Untuk mencapai hal ini, peran negara dalam memfasilitasi proses pelebagaan melalui tiga mekanisme yaitu regulasi, finansial, dan pengembangan infrastruktur.(Theda Skocpol, 1979)

Pelebagaan partai politik merujuk pada proses formalisasi partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang sah secara hukum. Pelebagaan meliputi berbagai aspek, mulai dari pendirian partai hingga pembentukan struktur organisasi dan pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelebagaan partai politik membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota partai untuk memperkuat organisasi partai. Pelebagaan partai politik di berbagai tingkatan baik itu lokal, nasional dan transnasional, dapat memiliki daya tanggap yang baik di dalam masyarakat, baik itu dalam organisasi partai pusat maupun cabang di daerah.(Jakobson, Saarts, & Kalev, 2021) Selain itu juga terjadi transformasi pemahaman masyarakat, terutama pada kredibilitas partai politik. Kredibilitas dapat diperoleh ketika sebuah partai politik sangat kuat dalam institusionalisasi partai.(Kambo, 2017)

Partai Buruh merupakan partai politik yang fokus pada isu-isu buruh dan tenaga kerja. Partai Buruh memiliki sejarah panjang di berbagai negara dan muncul sebagai bentuk perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Partai Buruh juga memperjuangkan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan kepentingan buruh. Dalam konteks Indonesia, Partai Buruh merupakan salah satu partai politik baru yang mulai bermunculan sejak era reformasi pada tahun 1998. Partai Buruh mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan buruh dan tenaga kerja di Indonesia. Namun, Partai Buruh masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat organisasi dan pelebagaan partai secara formal.

Berbagai macam problematika pelebagaan yang dihadapi partai politik, diketahui bahwa “kemunculan calon tunggal menandakan hilangnya kompetisi

dalam sistem kepartaian di Indonesia, tingginya angka golput menandakan gejala disfungsi partai politik dalam menjangking representasi, pendidikan politik, dan membentuk partai, munculnya calon independen boneka menunjukkan adanya gejala perilaku tidak demokratis dari para elite partai, dan kemunculan kartelisasi partai politik dalam pilkada menunjukkan tidak adanya fragmentasi ideologi yang jelas sehingga berakhir pada kompromi politik pragmatis".(Fadlurrohman, 2018)

Dalam konteks Indonesia, partai politik dianggap sebagai institusi yang penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Namun, partai politik di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah, seperti korupsi, tidak transparannya pemilihan calon anggota legislatif, dan kecenderungan untuk terlibat dalam politik uang. Selain itu, partai politik juga dihadapkan pada tantangan dari dinamika sosial yang terus berubah, termasuk perubahan sosial, politik, dan ekonomi.(Rustandi, 2021)

Partai Buruh Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan dalam memperkuat organisasi dan melembagakan partainya secara formal. Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan finansial, kekurangan kader yang berkualitas, serta perbedaan pandangan dalam partai. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang besar bagi Partai Buruh Sulawesi Selatan, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja. Masalah internal partai seperti ketidakcocokan personal dan ambisi politik individu menjadi faktor utama konflik internal Partai Buruh di Sulawesi Selatan, selain itu faktor eksternal seperti persaingan politik dengan partai lain juga mempengaruhi konflik di dalam partai.(Ujang Rosidin, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan Suryana, Ardiansyah, & Manan (2020) menjelaskan PSI sebagai partai politik baru berusaha menawarkan gagasan menjadi antitesa dari partai politik lama sebagai bentuk pelebagaan partainya. studi lain dilakukan oleh (Pastama & Noak (2022) yang mengkaji menjelaskan bahwa PSI Sebagai parpol baru melakukan pelebagaannya dengan cara menyajikan gagasan untuk menantang pikiran dari partai politik lama. Bukan hanya partai baru yang berusaha melakukan pelebagaan diorganisasi kepartaiannya. Partai besar dan lama juga melakukan hal tersebut. Seperti Partai Golkar dalam studi Primadi & Purwaningsih (2019) yang menguraikan pelebagaan partai ala Golkar di titik beratkan pada regenerasi kepemimpinan. Selain itu studi Fajri (2019) dan Pratama & Rusta (2022) yang mengkaji bahwa pelebagaan partai politik merujuk pada pemaksimalan kinerja kader dan penguatan sistem internal kepengurusan partai.

Berdasarkan hal tersebut setiap partai politik memiliki cara tersendiri dalam proses pelebagaan partainya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Buruh Provinsi Sulawesi Selatan yang mana kiprah partai politik ini akan terlihat di pemilu 2024 mendatang. Berbeda dengan penelitian yang lain, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam jurnal ini adalah untuk menganalisis problematika pelebagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan. Secara spesifik, tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi problematika pelebagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan, seperti kurangnya dukungan finansial, kekurangan kader yang berkualitas, serta perbedaan pandangan dalam partai.

Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui dampak dari problematika pelebagaan Partai Buruh terhadap proses politik di Sulawesi Selatan, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja. Selain itu tujuannya adalah untuk menganalisis berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi problematika pelebagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan, seperti meningkatkan kualitas kader, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan meningkatkan kerja sama antara anggota partai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi dalam memperkuat pelebagaan Partai Buruh sebagai partai politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan beberapa pemahaman lebih dalam tentang proses pelebagaan partai politik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai problematika pelebagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut.

Metode

Metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang dipergunakan untuk menggambarkan beberapa fenomena dan keadaan yang ada, dan memberikan interpretasi yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah anggota Partai Buruh di Sulawesi Selatan, pengurus Partai Buruh di Sulawesi Selatan, dan masyarakat yang terlibat dengan Partai Buruh di Sulawesi Selatan.

Wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data untuk penelitian ini. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data dari responden mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap pelebagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan. Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai tindakan dan perilaku anggota Partai Buruh di Sulawesi Selatan dalam kegiatan partai. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan Partai Buruh di Sulawesi Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Amdar, 2023) . Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan melakukan pengelompokan data menjadi tema-tema tertentu yang diidentifikasi dari data yang diperoleh. Setelah tema-tema teridentifikasi, akan dilakukan interpretasi dan penafsiran data untuk memperoleh

temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Validitas data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui triangulasi data, yaitu dengan menggabungkan hasil dari teknik pengumpulan data yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan

Partai Buruh merupakan partai politik baru di Sulawesi Selatan yang baru saja didirikan pada tahun 2014 dengan fokus pada isu-isu buruh dan tenaga kerja. Partai Buruh berusaha untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan masyarakat kecil serta menawarkan solusi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Partai Buruh memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah masyarakat, terutama di kalangan buruh dan tenaga kerja. Namun, dalam pelembagaannya sebagai partai politik, Partai Buruh mengalami berbagai problematika, terutama dalam hal pelembagaan.

Pelembagaan partai politik merupakan proses formalisasi partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang sah secara hukum. Pelembagaan meliputi berbagai aspek, mulai dari pendirian partai hingga pembentukan struktur organisasi dan pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelembagaan partai politik membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota partai untuk memperkuat organisasi partai. Pentingnya partisipasi publik dalam memperkuat institusi partai politik dan menjaga stabilitas politik di Indonesia. Dalam upaya memperkuat pelembagaan partai politik, diperlukan kerja sama antara partai politik dan masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia. (Rustandi, 2021)

Proses pelembagaan terjadi ketika sebuah kebijakan atau program pemerintah berhasil diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga menjadi bagian dari institusi yang mapan dan diakui oleh masyarakat. Kebijakan merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah. (Hastira, 2022) Untuk mencapai hal ini, pentingnya peran negara dalam memfasilitasi proses pelembagaan melalui tiga mekanisme yaitu regulasi, finansial, dan pengembangan infrastruktur. Regulasi merujuk pada peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat. Finansial mencakup pengelolaan anggaran dan alokasi sumber daya untuk membiayai program-program pemerintah. Pengembangan infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung program-program pemerintah. (Theda Skocpol, 1979)

Dalam konteks Partai Buruh di Sulawesi Selatan, dapat dikatakan bahwa partai ini masih dalam tahap awal pelembagaan, karena belum sepenuhnya memiliki lembaga-lembaga yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan politiknya. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi indikator sejauh mana Partai Buruh telah berhasil mengembangkan lembaga-lembaga yang kuat.

Pertama, partai ini telah memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat cabang di daerah-daerah. Kedua, Partai Buruh juga telah mengembangkan beberapa program dan kegiatan politik yang konsisten dengan ideologi dan tujuan partainya, seperti advokasi hak buruh dan tenaga kerja, serta kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kaum pekerja.

Pelebagaan adalah suatu proses yang kompleks dan terus-menerus, bukan sekadar hasil akhir atau titik akhir dari pembentukan suatu institusi politik. Ia berpendapat bahwa institusi politik tidaklah statis, tetapi selalu berubah dalam merespons tuntutan dari aktor-aktor politik dan perubahan lingkungan yang ada. Pentingnya peran agen dan struktur dalam proses pelembagaan, dan menyoroti pentingnya interaksi dan negosiasi antara kedua faktor tersebut dalam membentuk dan mempertahankan institusi politik. (Thelen, 2004)

Dalam konteks pelembagaan partai buruh di Sulawesi Selatan, pelembagaan partai terjadi ketika partai tersebut memiliki struktur organisasi yang mapan dan terbuka, aturan dan norma yang jelas, dan memiliki dukungan dari anggota dan pengikutnya. Namun, ia menekankan bahwa pelembagaan partai tidaklah menjadi tujuan akhir dari partai politik, melainkan sebuah proses dinamis yang selalu berubah dan berkembang. Dalam pandangannya, partai politik yang berhasil melembagakan dirinya secara kuat dan mapan tidak selalu menjadi partai yang sukses dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, melainkan partai yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan di lingkungannya dan tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan politik yang ada.

2. Tantangan Pelebagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan

Secara keseluruhan, Partai Buruh di Sulawesi Selatan masih dalam tahap awal pelembagaan, namun telah mengembangkan beberapa lembaga dan program politik yang konsisten dengan ideologi dan tujuan partainya. Untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang lebih kuat dan konsisten, Partai Buruh perlu meningkatkan kualitas kader dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan serupa. Namun, dalam hal pengembangan lembaga-lembaga yang kuat, Partai Buruh masih memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah kualitas kader yang masih perlu ditingkatkan. Kader yang berkualitas akan menjadi basis utama dalam pembentukan lembaga-lembaga yang kuat, sehingga Partai Buruh perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan politik bagi para kader yang ada. Selain itu, Partai Buruh juga perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan serupa, seperti serikat pekerja, LSM, dan kelompok advokasi hak-hak buruh. Partai Buruh Sulawesi Selatan mengalami kendala dalam pelembagaannya, terutama dalam hal pengorganisasian dan sumber daya yang terbatas (Nur & Basri, 2021).

Proses pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan menghadapi beberapa tantangan. Pertama, minimnya dukungan dari masyarakat. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah pendukung yang bergabung dengan Partai Buruh dan minimnya

perhatian media massa terhadap partai ini. Kedua, kurangnya dana untuk mengembangkan partai. Sebagai partai politik baru, Partai Buruh mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendanaan untuk mengembangkan partai. Ketiga, persaingan dengan partai-partai yang sudah ada. Partai Buruh harus bersaing dengan partai-partai yang sudah ada dan memiliki basis dukungan yang kuat di Sulawesi Selatan.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Partai Buruh Sulawesi Selatan adalah kurangnya dukungan finansial dari pemerintah. Selain itu, partai ini juga menghadapi tekanan politik dari partai-partai besar yang sudah mapan di daerah tersebut. Masih banyak partai-partai politik yang mengalami kendala dalam hal pelembagaan dan manajemen pemenangan, antara lain dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam hal pengelolaan dana kampanye. (Sari & Yusrizal, 2020)

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi problematika pelembagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan adalah pertama, ideologi sosialis yang diusung oleh Partai Buruh tidak populer di masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas merupakan muslim dengan pemahaman islam yang kuat. Kedua, kurangnya pengalaman dan jaringan politik dari pengurus partai yang mayoritas berasal dari kalangan aktivis buruh dan masyarakat sipil. Ketiga, minimnya dukungan dari tokoh politik dan elit lokal di Sulawesi Selatan yang cenderung terkooptasi oleh partai-partai yang sudah ada. Keempat, kurangnya akses media massa dan minimnya kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Buruh. Kelima, persaingan dengan partai-partai yang sudah ada dan memiliki basis dukungan yang kuat di Sulawesi Selatan. Keenam, kurangnya dana untuk mengembangkan partai sehingga Partai Buruh mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendanaan untuk mengembangkan partai.

Tantangan utama Partai Buruh Sulawesi Selatan adalah terkait dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk kurangnya sumber daya, ketidakmampuan memperluas jaringan dukungan, dan masalah internal dalam organisasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi ketergantungan pada tokoh sentral dan kurangnya dukungan dari partai politik lain (Novitasari & Nurjaya, 2021). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelembagaan partai politik di Indonesia, seperti pendanaan, kualitas kepemimpinan, struktur organisasi, dan hubungan dengan masyarakat (Rustandi, 2021).

Meskipun menghadapi banyak tantangan dan faktor penghambat, Partai Buruh di Sulawesi Selatan masih memiliki potensi untuk berkembang dan memperjuangkan hak-hak buruh dan masyarakat kecil. Partai ini perlu melakukan berbagai upaya untuk memperkuat basis dukungan dan meningkatkan visibilitas partai di Sulawesi Selatan.

4. Dampak Problematika Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan

Problematika pelembagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan memiliki beberapa dampak terhadap proses politik di daerah tersebut, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja. Beberapa dampak tersebut yaitu:

- a. Minimnya wakil buruh dan tenaga kerja di parlemen.

Dalam proses politik, partai politik merupakan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan parlemen. Keterwakilan buruh dan tenaga kerja di parlemen dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka. Namun, karena problematika pelembagaan Partai Buruh, maka keterwakilan tersebut menjadi minim, sehingga kepentingan dan aspirasi buruh dan tenaga kerja sulit untuk didengar oleh pemerintah dan parlemen.

- b. Terbatasnya alternatif politik.

Partai Buruh sebagai partai yang mewakili kepentingan buruh dan tenaga kerja menjadi alternatif politik bagi masyarakat yang peduli terhadap nasib buruh dan tenaga kerja. Dengan minimnya dukungan dan problematika pelembagaan yang dialami oleh Partai Buruh, maka masyarakat memiliki terbatasnya alternatif politik yang dapat memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka.

- c. Mengurangi kemungkinan adanya regulasi dan kebijakan pro-buruh dan tenaga kerja.

Partai politik memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi. Dengan minimnya perwakilan buruh dan tenaga kerja di parlemen, maka kebijakan dan regulasi yang menguntungkan mereka dapat terbatas. Selain itu, minimnya alternatif politik yang pro-buruh dan tenaga kerja dapat mengurangi kemungkinan adanya kebijakan dan regulasi yang pro-buruh dan tenaga kerja.

- d. Meningkatkan ketidakpuasan masyarakat.

Buruh dan tenaga kerja merupakan bagian penting dari masyarakat Sulawesi Selatan. Keterwakilan yang minim dan minimnya alternatif politik yang pro-buruh dan tenaga kerja dapat meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan parlemen yang dianggap tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

5. Upaya-Upaya Mengatasi Problematika Pelembagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan

Problematika pelembagaan Partai Buruh dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses politik di Sulawesi Selatan, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbaiki pelembagaan Partai Buruh agar dapat menjadi alternatif politik yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja. Berikut

adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika pelebagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Sulawesi Selatan:

a. Meningkatkan kualitas kader.

Partai Buruh dapat melakukan pelatihan dan pendidikan politik bagi kader-kadernya agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ideologi partai, visi dan misi partai, serta strategi dan taktik politik yang efektif. Dengan memiliki kader-kader yang berkualitas, Partai Buruh dapat lebih mudah meraih dukungan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan tenaga kerja.

b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Partai Buruh dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien. Misalnya, dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial dan teknologi informasi, Partai Buruh dapat meningkatkan visibilitas dan kehadirannya di tengah masyarakat. Selain itu, dengan menggalang dukungan dari donatur dan simpatisan, Partai Buruh dapat meningkatkan kekuatan finansialnya untuk melaksanakan kegiatan politik.

c. Meningkatkan kerja sama antara anggota partai.

Partai Buruh dapat memperkuat kerja sama antara anggota partai dengan mengadakan pertemuan rutin, diskusi, dan koordinasi. Dalam pertemuan tersebut, anggota partai dapat membahas strategi dan taktik politik yang efektif, serta merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah internal yang ada di Partai Buruh. Dengan memperkuat kerja sama antara anggota partai, Partai Buruh dapat lebih fokus pada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

6. Strategi Penguatan Pelebagaan Partai Buruh di Sulawesi Selatan

Adanya upaya-upaya tersebut juga diperlukan strategi yang tepat guna memperkuat pelebagaan Partai Buruh sebagai partai politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelebagaan Partai Buruh sebagai partai politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan:

a. Membangun basis massa yang kuat.

Partai Buruh perlu membangun basis massa yang kuat dengan memperluas jaringan dan menggalang dukungan dari buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada buruh dan tenaga kerja, mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah buruh dan tenaga kerja, dan memperkuat kerja sama dengan organisasi-organisasi buruh dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Partai politik baru harus melakukan pelebagaan partai yang kuat melalui

- pembentukan lembaga-lembaga partai seperti badan kehormatan, badan pengurus, dan badan pemenangan pemilu.(Anwar & Arifin, 2020)
- b. Menjalin kerja sama dengan partai politik lain.
Partai Buruh dapat menjalin kerja sama dengan partai politik lain yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Partai Buruh dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan tenaga kerja. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan politik Partai Buruh dan memperkuat posisi Partai Buruh dalam arena politik. Partai politik baru perlu melakukan kerja sama dengan partai politik yang sudah mapan, melakukan pendidikan politik pada kader partai, serta melakukan strategi kampanye yang efektif dan mengedepankan isu-isu yang penting bagi masyarakat.(Anwar & Arifin, 2020)
 - c. Memperkuat ideologi dan program partai.
Partai Buruh perlu memperkuat ideologi dan program partainya dengan melakukan diskusi dan konsultasi internal secara rutin, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan program partai. Dengan memiliki ideologi dan program yang jelas dan konsisten, Partai Buruh dapat menarik simpati dan dukungan dari masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja.
 - d. Meningkatkan kualitas kader.
Partai Buruh perlu meningkatkan kualitas kader-kadernya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan politik secara rutin, serta memperhatikan pengembangan karier kader-kader terbaik. Dengan memiliki kader-kader yang berkualitas, Partai Buruh dapat lebih mudah meraih dukungan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan tenaga kerja. Strategi kaderisasi dan pelebagaan partai politik baru meliputi perekrutan, pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kader. Partai politik baru juga perlu memperkuat struktur organisasi dan memperluas jaringan dukungan untuk memperoleh suara yang cukup pada pemilihan.(Fajriansyah, Haryanto, & Daulay, 2021)
 - e. Menjalin hubungan yang baik dengan media.
Partai Buruh perlu menjalin hubungan yang baik dengan media, baik media *mainstream* maupun media alternatif. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan media, Partai Buruh dapat meningkatkan visibilitas dan kehadirannya di tengah masyarakat, serta dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan tenaga kerja melalui media. Partai politik baru juga perlu memperhatikan regulasi dan mekanisme yang berlaku serta mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dengan masyarakat.(Fajriansyah et al., 2021)

Kesimpulan

Partai Buruh Sulawesi Selatan mengalami berbagai masalah dalam pelembagaannya sebagai partai baru di Sulawesi Selatan. Masalah yang dihadapi oleh Partai Buruh Sulawesi Selatan antara lain terkait dengan keterbatasan sumber

daya manusia, finansial, dan jaringan politik. Namun, Partai Buruh Sulawesi Selatan mampu mengatasi beberapa masalah tersebut dengan strategi-strategi seperti membentuk koalisi dengan partai-partai lain dan meningkatkan partisipasi kader dalam kegiatan partai. Proses pelebagaan partai politik baru membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terencana, termasuk dalam aspek organisasi, keuangan, dan kaderisasi. Dalam proses pelebagaan partai politik baru, terdapat berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam mencari sumber dana dan kader yang berkualitas, serta perlawanan dari partai politik yang sudah mapan di daerah tersebut. Oleh karena itu, partai politik baru harus memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan tersebut. Kader merupakan salah satu faktor kunci dalam proses pelebagaan partai politik baru. Kader yang berkualitas dapat membantu memperkuat struktur organisasi partai dan memastikan partai dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, partai politik baru harus memiliki program kaderisasi yang baik dan terencana dengan baik. Dalam proses pelebagaan partai politik baru, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat membantu memperkuat struktur organisasi partai dan memastikan partai dapat bertahan dalam jangka panjang, seperti dukungan dari masyarakat, media, dan lembaga-lembaga pendukung demokrasi.

Dalam rangka memperkuat pelebagaan partai politik, Partai Buruh Sulawesi Selatan perlu mengembangkan strategi penggalangan massa yang lebih efektif untuk mendapatkan dukungan publik yang lebih luas dan membangun hubungan yang lebih baik dengan kelompok-kelompok sosial yang relevan. Partai politik perlu lebih memperhatikan aspek kaderisasi dan peningkatan kapasitas anggota partai dalam mengelola organisasi dan membangun jejaring dengan masyarakat, serta memperkuat sistem pengawasan internal agar terhindar dari praktik-praktik korupsi dan pelanggaran etika politik. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi partai politik baru dalam proses pelebagaan mereka, terutama dalam hal pemberian akses yang lebih mudah dan transparan terhadap pendanaan partai politik serta proses pendaftaran dan verifikasi partai politik oleh lembaga yang berwenang. Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam tentang peran dan kontribusi partai politik baru dalam pengembangan demokrasi di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka dalam memperkuat pelebagaan partai politik.

Referensi

- Amwar, M., & Arifin, M. (2020). Strategi Pelebagaan Partai Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Analisis Politik*, 7(1), 36–52.
- Amdar, R. (2023). Implementasi E- Government (Aplikasi Sentuh Tanahku) dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor

- Pertanahan Kota Kendari. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 2(3), 285. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i3.31260>
- Arifwendri Pratama, Andri Rusta, T. (2022). Pelembagaan partai amanat nasional (PAN) provinsi sumatera barat tahun 2019 – 2022. *Suara Politik*, 1(2), 1–6.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fadlurrohman, A. Z. (2018). Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 3(2), 16–30.
- Fajri, M. N. (2019). Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik. *Universitas Islam Indonesia*, 1–17. Retrieved from <http://fh.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/Call-for-paper-pshk-fh-uui-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-Penguatan-Pelembagaan-Partai-Politik-Melalui-Penataan-Pengaturan-OSP-Politik-M-Nurul-Fajri.pdf>.
- Fajriansyah, R., Haryanto, B., & Daulay, D. A. (2021). Strategi Kaderisasi dan Pelembagaan Partai Politik Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 9(1), 1–12.
- Hastira, M. F. (2022). Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda RTRW Kota Parepare). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45–57.
- I Gede Pastama, Piers Andreas Noak, G. I. P. (2022). Partai Baru dan Orang Baru, Analisis Kiprah Partai Solidaritas Indonesia Bali Perspektif Randall dan Svasand. *Nawala Politika*, 1(1), 1–13.
- Jakobson, M. L., Saarts, T., & Kalev, L. (2021). Institutionalization of transnationalizing political parties: the case of the Conservative People’s Party of Estonia. *Comparative Migration Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40878-021-00241-5>
- Kahin, A., & Aspinall, E. (2021). Political Parties, Power Sharing, and Democracy in Indonesia: Evidence from Sulawesi Selatan. *Jurnal Comparative Politics*, 5(3), 371–390.
- Kambo, G. A. (2017). Institutionalization Process Dymension of Political Parties (Study of Institutionalization of Golkar Party in South Sulawesi Province). *Journal of Society and Governance*, 1(2), 90245.
- Lapalombara, J., & Anderson, J. (1992). *Political Parties, Encyclopedia of Government and Politics* (Volume 1). New York: Routledge.
- Novitasari, R., & Nurjaya, I. (2021). Challenges and Prospects of Partai Buruh Sulsel: A Case Study of Political Parties in Indonesia. *Jurnal Journal of Southeast Asian Studies and Globalization*, 1(1), 54–63.
- Nur, N., & Basri, H. (2021). The Dynamics of Political Parties in Indonesia: The Case of Partai Buruh Sulsel. *International Journal of Political Science and Development*, 9(4), 111–121.

- Primadi, A., & Purwaningsih, T. (2019). Institusionalisasi Partai Politik Dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus : Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Journal of Government and Civil Society*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i1.1099>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. , Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 (2008).
- Rustandi, D. (2021). Partai Politik dan Dinamika Sosial di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 9(1), 37–56.
- Sari, D. K., & Yusrizal. (2020). Analisis Pelembagaan Partai Politik Pada Pemilu 2019. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(1), 34–44.
- Suryana, N., Ardiansyah, A. G., & Manan, F. (2020). Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 52. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10677>
- Theda Skocpol. (1979). *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thelen, K. (2004). How institutions evolve: The political economy of skills in Germany, Britain, the United States, and Japan. *How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan*, (March), 1–335. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790997>
- Ujang Rosidin. (2021). The Disputes between Political Parties in Developing Democracies: A Case Study of Partai Buruh Sulsel. *Jurnal International Journal of Humanities, Literature and Arts Studies*, 3(3), 87–95.
- Yuda Wiryono. (2021). Pelembagaan Partai Politik dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 43–57.